

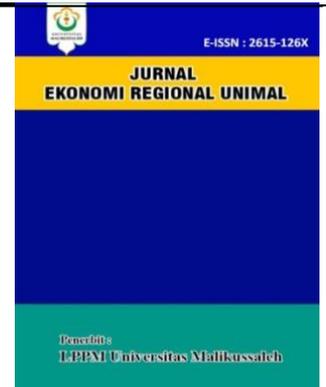
## Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara

Rizqan Saniah\*<sup>a</sup>Murtala\*<sup>b</sup>

<sup>ab</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

1. Author : [rizqan.190430040@mhs.unimal.ac.id](mailto:rizqan.190430040@mhs.unimal.ac.id)

2. Corresponding author : [murtala@unimal.ac.id](mailto:murtala@unimal.ac.id)



### ARTICLE INFORMATION

### ABSTRACT

#### Keywords:

Total population, GRDP, Regional Expenditure, and Regional Tax Revenue

*This study aims to determine the effect of Population, Gross Regional Domestic Product, and Regional Expenditure on Regional Tax Revenue in 12 Regencies/Cities in North Sumatra Province in 2012-2021. The data used in this research is data obtained from the Central Bureau of Statistics. The analytical method used is panel data regression using the E-views 10 program. The results show that partially the population variable has a negative and significant effect on local tax revenues, the Gross Regional Domestic Product (GRDP) variable has a significant and significant effect on local tax revenues, and variables Regional spending has an effect on and is significant on local tax revenues. The results of the study simultaneously the variables of population, GRDP, and regional expenditure have an effectsignificant to the local tax revenue variable. Coefficient of Determination ( $R^2$ ) of 0.624721 which means that the effect of population, GRDP and regional spending on regional tax revenues is 0.624721 or 62.47% while the remaining 37.53% influenced by variables outside this study.*

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan manusia, bangsa serta negara. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, bagi negara Indonesia terdiri dari berbagai wilayah yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena setiap daerah memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda dalam mengembangkan seluruh potensi ekonominya. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara teratur dan terarah agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Sumatera Utara merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di Indonesia. Sehingga memiliki kultur masyarakat yang beragam serta memiliki sumber daya dan kekayaan alam yang berbeda tiap daerah. Dilihat

dari struktur ekonominya, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera yaitu sebesar 23,37 persen pada tahun 2021. Adapun permasalahan ekonomi yang saat ini dihadapi Provinsi Sumatera Utara diantaranya yaitu disebabkan oleh tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah yang disebabkan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis maupun politik. Kesenjangan pembangunan ini terlihat antara wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat, dimana wilayah-wilayah Pantai Timur lebih maju dibandingkan wilayah Pantai Barat.

Kemandirian suatu daerah dalam kemampuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dari pusat. Provinsi Sumatera Utara memberlakukan Otonomi

Daerah yang diberikan wewenang untuk mengurus dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih baik. Adapun Komponen pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari komponen pendapatan daerah terutama pada bidang retribusi dan pajak daerah diharapkan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang besar dalam sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kontribusi terbesar dari PAD yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah yang mencakup 77,88% dari total PAD yang dihasilkan. Sehingga penelitian ini difokuskan di Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten/Kota wilayah Pantai Barat dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dengan tujuan untuk dapat menggali berbagai potensi yang ada pada Kabupaten/Kota wilayah Pantai Barat di Sumatera Utara. Dengan demikian dapat meningkatkan PAD khususnya berasal dari pajak secara signifikan.

Pajak daerah adalah pungutan yang dibebankan oleh negara kepada warga negara atau wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang merupakan sumber penerimaan yang dipakai oleh pemerintah untuk pembiayaan dalam menggerakkan roda pemerintah. Diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi dalam mengelola wilayah itu sendiri (Mina & Ratna, 2020). Berikut adalah perkembangan pajak daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun ke tahun:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak Daerah 12 Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021**

Wilayah	Penerimaan Pajak Daerah (Ribu Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	7.079.591	8.383.137	8.635.780	5.980.156	6.886.385
Mandailing Natal	21.490.230	11.714.027	33.284.151	10.639.153	87.602.108
Taparuli Selatan	21.604.472	35.419.297	58.425.619	34.140.923	34.343.113
Taparuli Tengah	15.818.121	18.015.233	20.293.410	18.988.067	21.753.911
Nias Selatan	4.266.281	6.389.584	7.058.816	5.701.344	8.806.323
Padang Lawas Utara	13.570.378	13.265.207	12.973.809	21.984.878	17.570.857
Padang Lawas	10.749.936	10.140.623	9.908.848	12.723.483	13.130.702
Nias Utara	3.246.760	4.599.041	8.621.072	6.000.321	4.655.453
Nias Barat	5.148.984	6.234.073	6.379.684	6.308.869	5.359.179
Sibolga	9.328.678	11.109.186	11.512.425	9.712.781	11.398.529
Padang Sidempuan	15.653.315	18.389.004	18.577.289	16.238.177	17.346.867
Gunungsitoli	13.254.315	15.015.863	15.090.778	11.951.903	15.305.277
Jumlah	141.211.061	158.674.275	210.761.681	160.370.055	244.158.704

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan fenomena Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.370.055 dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar Rp. 244.158.704.

Dari hal tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak pada setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif. Artinya ada tahun yang mengalami kenaikan dan ada tahun yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan, salah satunya yaitu dampak pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan perekonomian berjalan lambat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah yang diterima. Adapun permasalahan lain yaitu sumber-sumber penerimaan pada sektor pajak daerah yang potensial masih harus perlu digali secara maksimal. Namun tetap dalam pemungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum adanya sanksi yang tegas bagi penunggak pajak.

Peningkatan PAD khususnya penerimaan pajak daerah suatu wilayah tentunya tidak terlepas oleh beberapa faktor. Penduduk merupakan faktor yang sangat penting bagi pembangunan karena penduduk merupakan subjek atau penggerak perekonomian dalam suatu daerah, apabila jumlah penduduk meningkat maka aktivitas perekonomian suatu daerah juga ikut meningkat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga pajak yang diterima juga ikut meningkat (Saputra et al., 2014).

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk 12 Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021**

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	142.110	142.840	143.319	143.983	147.794
Mandailing Natal	439.505	443.490	447.287	451.028	478.062
Tapaneli Selatan	278.587	280.283	281.931	283.389	303.685
Tapaneli Tengah	363.705	370.171	376.667	382.917	369.300
Nias Selatan	314.395	317.207	319.902	322.520	366.163
Padang Lawas Utara	262.895	267.771	272.713	277.423	263.551
Padang Lawas	269.799	275.515	281.239	286.627	263.719
Nias Utara	136.090	137.002	137.967	138.800	148.790
Nias Barat	81.279	81.663	82.154	82.425	90.585
Sibolga	87.090	87.317	87.626	87.791	89.932
Padang Sidempuan	216.013	218.892	221.827	224.483	227.674
Gunungsitoli	139.281	140.927	142.426	143.776	136.707
Jumlah	2.730.749	2.763.078	2.795.058	2.825.162	2.885.962

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2017-2021 di 12 Kabupaten/Kota Sumatera Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mandailing Natal merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi sedangkan Nias Barat adalah wilayah dengan jumlah penduduk terendah.

Adam Smith dalam Aulia et al., (2022) menjelaskan bahwa penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga pengguna skala ekonomi di dalam produksi. Sehingga jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, dimana jumlah penduduk naik maka pajak juga ikut naik.

Salah satu indikator yang dijadikan tolak ukur secara makro keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat maka golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan sektor-sektor pajak daerah ada dalam PDRB (Sania et al., 2018).

**Tabel 3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**12 Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara**  
**Tahun 2017-2021**

Wilayah	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	2.325,01	2.440,16	2.563,03	2.609,14	2.666,86
Mandailing Natal	8.416,50	8.904,14	9.376,46	9.288,65	9.585,90
Tapaneli Selatan	8.748,18	9.201,96	9.683,66	9.721,77	10.036,71
Tapaneli Tengah	6.348,44	6.678,25	7.024,15	6.970,58	7.149,28
Nias Selatan	3.826,62	4.018,74	4.221,04	4.246,83	4.332,63
Padang Lawas Utara	7.378,98	7.791,05	8.228,45	8.322,51	8.593,64
Padang Lawas	7.110,25	7.534,30	7.959,31	8.053,50	8.362,13
Nias Utara	2.134,49	2.228,75	2.332,44	2.369,36	2.417,20
Nias Barat	1.126,19	1.179,91	1.236,73	1.257,28	1.285,66
Sibolga	3.224,58	3.393,91	3.570,33	3.521,72	3.595,70
Padang Sidempuan	3.830,32	4.038,93	4.261,32	4.230,41	4.346,78
Gunungsitoli	3.049,12	3.232,97	3.428,45	3.441,65	3.519,13
Jumlah	57.519	60.643	63.885	64.033	65.892

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hanya terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang PDRB nya mengalami penurunan pada tahun 2020 pada saat terjadinya lonjakan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang mempengaruhi berbagai sektor. Adapun empat Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Padang Sidempuan.

Semakin membaiknya PDRB maka perekonomian juga meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat PDRB daerah maka semakin sejahtera penduduknya sehingga pendapatan tinggi dan merata antar daerah akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah, pemerintah menggunakan anggaran belanja daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan publik yang berguna untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah untuk mendanai setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran belanja daerah juga mencerminkan bagaimana pemerintah menentukan prioritas terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang digunakan.

**Tabel 4**  
**Belanja Daerah 12 Kabupaten/Kota Di**  
**Sumatera Utara Tahun 2017-2021**

Wilayah	Belanja Daerah (Ribu Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	881.983.873	930.217.782	975.280.101	902.078.516	839.402.042
Mandailing Natal	1.561.204.714	1.506.945.739	1.617.408.773	1.559.758.322	1.614.881.787
Tapaneli Selatan	1.196.223.541	1.315.263.549	1.463.791.932	1.350.731.462	1.297.150.101
Tapaneli Tengah	1.120.351.198	1.150.971.726	1.226.312.259	1.262.417.324	1.159.733.684
Nias Selatan	1.066.164.746	1.171.732.688	1.308.864.756	1.555.765.443	1.411.390.331
Padang Lawas Utara	1.185.284.307	1.081.855.422	1.190.735.751	1.082.375.068	1.116.550.581
Padang Lawas	1.033.385.760	1.067.060.547	1.142.744.160	1.035.264.004	1.076.587.746
Nias Utara	722.898.159	745.799.698	839.420.196	815.700.720	737.349.451
Nias Barat	634.418.293	709.386.520	710.214.092	671.175.022	621.190.863
Sibolga	597.687.532	636.738.977	581.264.116	568.424.347	581.319.532
Padang Sidempuan	833.862.861	821.661.405	846.228.538	689.740.622	773.573.858
Gunungsitoli	778.005.374	702.837.582	732.295.074	719.249.943	693.377.502
Jumlah	11.611.470.358	11.840.471.635	12.634.559.748	12.212.680.793	11.922.507.478

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan Tabel 4 di atas bahwa belanja daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 4 memiliki jumlah belanja daerah mengalami kenaikan dan penurunan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Adanya penurunan belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.212.680.793 sampai tahun 2021 sebesar Rp. 11.922.507.487.

Meningkatnya aktifitas pelaku ekonomi tentu harus diimbangi dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Dengan meningkatnya produktifitas para pelaku ekonomi maka akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Sehingga perlu dikaji faktor manakah yang akan dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan sehingga dapat dilakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Peraturan Perundang-undangan NO 34 tahun 2000 Pasal 1 angka 6, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilaksanakan oleh sebuah daerah terhadap individu ataupun sebuah lembaga dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung yang sifatnya dipaksakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ada

yang berfungsi untuk pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Penerimaan Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Early, 2013).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individu maupun lembaga yang pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku tanpa mengharapkan imbalan secara langsung yang berfungsi untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pada daerah.

### Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Stastistik (BPS, 2021) penduduk adalah mereka yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah Penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnisasi (*seculer stagnantion*) dalam Putra & Anis (2021) yang menerangkan bahwa bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agegatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Dari segi permintaan dan penawaran, dimana dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. oleh karna itu perkembangan penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi apabila penduduk memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

### Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disuatu wilayah. Seperti yang dijelaskan dalam Badan Pusat Statistik (2021), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu priode tertentu.

Menurut Todaro (2002) Dalam (Lumy et al., 2018) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian

ditingkat daerah baik yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk daerah lain yang bertempat tinggal didaerah tersebut.

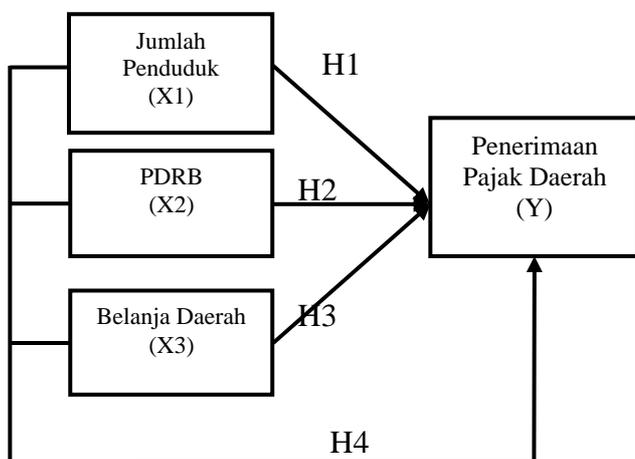
### Belanja Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Belanja daerah adalah sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja daerah dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum/daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran ini tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Nordiawan, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dari dana anggaran belanja daerah tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan daerah.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteleti. Oleh karna itu penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yaitu Variabel dependen dan Variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah (Y) dan Variabel independen yaitu Jumlah Penduduk (X1), Produk Domestik Regional Bruto (X2), Belanja Daerah (X3).



Gambar 1 Kerangka Konseptual

### Hipotesis

Hipotesis dapat didefenisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus di uji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_1$ : Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- $H_2$ : Diduga variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- $H_3$ : Diduga variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- $H_4$ : Diduga variabel Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah sebagai variabel dependen dan Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2021 yang terdiri dari Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data panel, dimana data panel merupakan data gabungan dari data *cross section* dan *time series*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data publikasi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari sumber data, sumber tertulis, sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang berupa data time series dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2012-2021. Agar bisa mendapatkan data Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang didapat dari laporan tahunan yang dipublikasikan di alamat website Bps.go.id serta dengan menggunakan studi pustaka (*library research*), dan Dokumentasi.

### Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun penjelasan untuk masing masing variabel di jelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pajak Daerah (Y)  
Untuk variabel penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini diambil dari data publikasi keuangan dari realisasi penerimaan pajak daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 2012 – 2021 yang diukur dengan satuan Ribu Rupiah.
- b. Jumlah Penduduk (X1)  
Variabel jumlah penduduk pada penelitian ini diambil dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 2012 2021 yang diukur dengan satuan Ribu Jiwa.
- c. Produk Domestik Regional Bruto (X2)  
Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada penelitian ini diambil dari PDRB Harga Konstan pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara pada kurun waktu 2012 - 2021 yang diukur dengan satuan Milyar Rupiah.
- d. Belanja Daerah (X3)  
Variabel belanja daerah pada penelitian ini diambil dari data publikasi keuangan yaitu anggaran pengeluaran belanja daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 2012 – 2021 yang diukur dengan satuan Ribu Rupiah.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara

normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Jarque-Bera test*.

Untuk mengetahui normal atau tidaknya residual secara sederhana yaitu dengan cara membandingkan nilai probabilitas *Jarque-Berahitung* dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila probabilitas *Jarque-Berahitung* lebih besar dari 0,05 maka residual terdistribusi dengan normal dan apabila kecil dari 0,05 maka residual terdistribusi tidak normal (Hadya et al., 2017).

### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) ujimultikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas. Model yang baik seharusnya antar variabel independen tidak ditemukannya kolerasi, akibat dari adanya multikolinieritas adalah banyak variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen namun nilai koefisien determinasi tetap tinggi. Untuk memperkirakan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi bisa diketahui dengan nilai r nya, apabila  $r < 0,8$  maka tidak terdapat hubungan antar variabel bebas dan apabila  $r > 0,8$  maka terdapat kolerasi antar variabel bebas.

### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Harvey (*Harvey Test*).

### Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan alat yang digunakan yaitu program *Eviews 10*. Regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun Model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln}X1_{it} + \beta_2 \text{Ln}X2_{it} + \beta_3 \text{Ln}X3_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y = Penerimaan Pajak Daerah  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi masing-masing variabel

X1	= Jumlah Penduduk
X2	= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
X3	= Belanja Daerah
i	= <i>Unit Cross Section</i>
t	= <i>Time Series</i>
e	= <i>Error</i> atau variabel pengganggu

### Penentuan Metode Estimasi

#### **Common Effect Model (CEM)**

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter data panel. Karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Model ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

#### **Fixed Effect Model (FEM)**

Untuk Mengestimasi data panel model *fixed effect* yaitu menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan *intersept* dengan koefisien yang sama. Pendekatan yang diambil dalam model ini adalah metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

#### **Random Effect Model (REM)**

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu, pada *Random Effect Model* (REM) perbedaan *intersept* diakomodasi oleh *error*. Keuntungan menggunakan *Random Effect Model* (REM) yakni menghilangkan heteroskedastisitas. sehingga metode yang tepat untuk mengestimasi model *Random Effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) dengan asumsi homokedastisitas dan tidak ada *cross sectional correlation*.

### Pemilihan Model

#### **Uji Chow**

Uji *Chow* merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan antara model *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel penelitian. Adapun pengambilan keputusan dalam uji *chow* dilihat dari *probability cross-section F*.

1. Jika nilai prob  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau model yang dipilih *fixed effect Model*.
2. Jika nilai prob  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau model yang dipilih *common effect Model*.

### Uji Hausman

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode *Fixed Effect Model* (FEM) dan metode *Random Effect Model* (REM) lebih baik dari metode *Common Effect Model* (CEM). Statistik uji hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan derajat kebebasan (df) sebanyak jumlah variabel bebas (variabel independen). Pengambilan Hipotesis dalam uji hausman adalah:  
 $H_0 = \beta_1 > 0,05$  *Random Effect Model* (REM)  
 $H_a = \beta_1 < 0,05$  *Fixed Effect Model* (FEM)

### Uji Lagrange Multiplier

Pengujian untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji *lagrange multiplier* hanya digunakan saat uji Chow dan uji Hausman menunjukkan hasil yang berbeda. Hipotesis dalam uji lagrange multiplier adalah:

$H_0 =$  *Common Effect Model* (CEM)

$H_a =$  *Random Effect Model* (REM)

Kriteria pengujian menyatakan jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya jika pengujian menyatakan nilai probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima. jika  $H_0$  diterima maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Namun jika  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

### Pengujian Hipotesis

#### **Uji t (Uji Parsial)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan prob t hitung dengan tingkat kesalahan alfa ( $\alpha$ ) misalnya sebesar 0.05.

- a. Jika nilai probabilitas T statistik  $> 0.05$ , maka hipotesis ditolak. Yang artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas T statistik  $< 0.05$ , maka hipotesis diterima. Yang artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### **Uji F (Uji Simultan)**

Uji statistik F pada dasarnya untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian hipotesis menggunakan

distribusi F. Dengan  $\alpha = 0,05$ , Adapun kriteria pengujian dengan uji F adalah:

1.  $H_0$  ditolak yaitu apabila value  $> 0,05$  atau apabila nilai signifikan lebih dari nilai  $\alpha 0,05$  berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan.
2.  $H_0$  diterima yaitu apabila value  $= 0,05$  atau apabila nilai signifikan kurang dari atau sama dengan nilai  $\alpha 0,05$  berarti model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

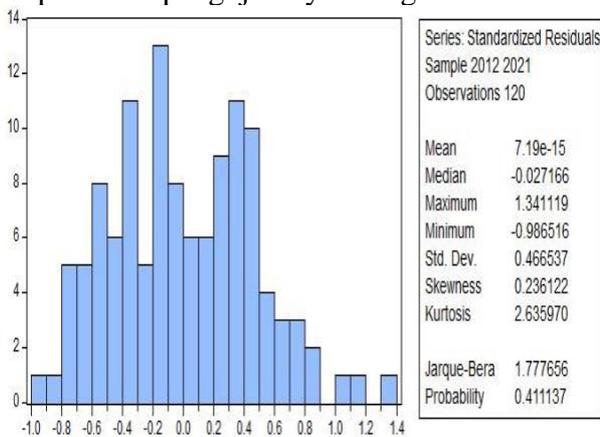
Koefisien Determinasi adalah koefisien yang menjelaskan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah  $0 < R^2 < 1$ , jika koefisien determinasi semakin kecil (mendekati 0) berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:



Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

**Gambar 2**  
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob JB lebih besar dari 0,05 yaitu  $0,411137 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas nilai residual terdistribusi secara normal dan analisis regresi layak digunakan.

#### Hasil Uji Multikolinieritas

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 5**

### Hasil Uji Multikolinieritas

	LN(JP)	LN(PDRB)	LN(BD)
LN(JP)	1.000.000	0.833718	0.727879
LN(PDRB)	0.833718	1.000.000	0.728854
LN(BD)	0.727879	0.728854	1.000.000

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 5 di atas hubungan antar variabel jumlah penduduk dan PDRB yaitu sebesar 0,833 dimana nilai toleransi dari hubungan variabel tersebut  $0,833 > 0,80$  yang artinya terjadi multikolinieritas, sedangkan hubungan antar variabel jumlah penduduk dan belanja daerah yaitu sebesar 0,727 dimana nilai toleransi dari hubungan variabel tersebut  $0,727 < 0,80$  yang artinya tidak terjadi multikolinieritas dan hubungan antar variabel PDRB dan belanja daerah yaitu sebesar 0,728 dimana nilai toleransi dari hubungan variabel tersebut  $0,728 < 0,80$  yang artinya tidak terjadi multikolinieritas.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 6**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-77171897	30908020	-2.496824	0.0139
LNJP	2520721.	2352516.	1.071500	0.2862
LNPNDRB	1413283.	2117895.	0.667305	0.5059
LNBD	1550108.	1969494.	0.787059	0.4329

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 6 di atas dilihat bahwa nilai probabilitas dari variabel Jumlah Penduduk lebih besar dari alpha 5% ( $0.2862 > 0,05$ ), variabel PDRB lebih besar dari alpha 5% ( $0.5059 > 0,05$ ), dan variabel Belanja Daerah lebih besar dari alpha 5% ( $0.4329$ ) maka di dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

#### Hasil Estimasi Regresi Data Panel

##### Hasil Uji Chow

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 7**  
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.

Cross-section F	10.570283	(11,105)	0.0000
Cross-section Chi-square	89.452487	11	0.0000

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 7 di atas dilihat bahwa nilai probabilitas *Chi Square* sebesar 0,0000 yang diperoleh dari regresi *Fixed Effect*. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari alpha 5% ( $0,0000 < 0,05$ ), model regresi *fixed effect* lebih baik dari *common Effect model*. Artinya model yang terbaik dan terpilih untuk sementara adalah *fixed effect* atau FEM.

### Hasil Uji Hausman

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.197555	3	0.1579

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,1579. Lebih besar dari alpha 5% ( $0,1579 > 0,05$ ) maka model *random effect* dinyatakan yang terbaik. Sehingga perlu dilanjutkan dengan melakukan pengujian *lagrange multiplier*.

### Hasil Uji Lagrange Multiplier

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	105.3167 (0.0000)	0.298531 (0.5848)	105.6152 (0.0000)

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa nilai *cross section Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 lebih rendah dari alpha 5% ( $0,0000 < 0,05$ ), sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan model *Random Effect*. Dari

pengujian yang dilakukan menggunakan model *lagrange multiplier* maka model terpilih *Random Effect*. Dengan demikian, baik pengujian uji chow, uji hausman dan *lagrange multiplier* semuanya memberikan hasil yang sangat dipercaya untuk menggunakan model *random effect* dalam penelitian ini.

### Hasil Regresi Data Panel

Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model *random effect*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian uji Chow dan uji Hausman. Hasil regresi model *random effect* yang terpilih pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Random Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.10558	3.151508	3.206586	0.0017
LNJP?	-0.935701	0.334294	2.799037	0.0060
LNPDRB?	1.128882	0.298274	3.784722	0.0002
LNBD?	1.119728	0.165887	6.749934	0.0000
Random Effects (Cross)				
_NIAS—C	0.058994			
_MANDAILINGNATAL—C	-0.040582			
_TAPANULITENGAH—C	0.181052			
_TAPANULISELATAN—C	0.134694			
_NIASSELATAN—C	-0.096434			
_PADANGLAWASUTAR A—C	-0.458494			
_PADANGLAWAS—C	-0.488272			
_NIASUTARA—C	-0.321890			
_NIASBARAT—C	0.210972			
_SIBOLGA—C	-0.151875			
_PADANGSIDEMPUAN—C	0.583782			
C	0.388053			
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.3769370	.5597	
Idiosyncratic random		0.3343100	.4403	
Weighted Statistics				
R-squared	0.634182	Mean dependent var	4.306211	
Adjusted R-squared	0.624721	S.D. dependent var	0.550868	
S.E. of regression	0.337462	Sum squared resid	13.21013	
F-statistic	67.03242	Durbin-Watson stat	1.865656	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.638333	Mean dependent var	15.94621	
Sum squared resid	25.90112	Durbin-Watson stat	0.951525	

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 10 di atas maka dapat diperoleh persamaan hasil regresi sebagai berikut:

$$\text{LNPPD} = -10.11 - 0.94\text{LNJP} + 1.13\text{LNPD} + 1.12\text{LNBD}$$

Dari persamaan model regresi di atas maka penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dari hasil regresi di atas adalah sebesar -10.11 yang artinya apabila jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja daerah tetap, maka penerimaan pajak daerah akan menurun sebesar 10.11%
2. Nilai koefisien variabel jumlah penduduk sebesar -0.94 yang artinya apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1%. Maka penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 0.94% dengan asumsi variabel lain di anggap konstan/tetap.
3. Nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1.13 yang artinya apabila jumlah Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan sebesar 1%. Maka jumlah penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.13% dengan asumsi variabel lain di anggap konstan/tetap.
4. Nilai koefisien variabel belanja daerah sebesar 1.12 yang artinya apabila jumlah belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 1%. Maka jumlah penerimaan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan sebesar 1.12% dengan asumsi variabel lain di anggap konstan/tetap.

Adapun hasil interpretasi pada Tabel 10 di atas dari variabel Jumlah Penduduk (JP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah (BD) pada 12 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Hasil Nilai Intersep Kabupaten/Kota Pada Model Random Effect**

Kabupaten/Kota	Konstanta	Intersep
_Nias--C	-10.10558 + 0.058994	-10.0466
_Mandailingnata--C	-10.10558 - 0.040582	-10.1462
_Tapanulitengah--C	-10.10558 + 0.181052	-9.9245
_Tapanuliselatan--C	-10.10558 + 0.134694	-9.9709
_Niasselatan--C	-10.10558 - 0.096434	-10.2020
_Padanglawasutara--C	-10.10558 - 0.458494	-10.5641
_Padanglawas--C	-10.10558 - 0.488272	-10.5938
_Niasutara--C	-10.10558 - 0.321890	-10.4275

_Niasbarat--C	-10.10558 + 0.210972	-9.8946
_Sibolga--C	-10.10558 - 0.151875	-10.2574
_Padangsidempuan--C	-10.10558 + 0.583782	-10.6894
_Gunungsitoli--C	-10.10558 + 0.388053	-9.7175

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

### Pengujian Hipotesis

#### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Hasil Uji t-Statistik**

Variabel Independen	t-Statistik	t-Tabel	Probabilty	Keterangan
JP	-2.799.037	1,6581	0.0060	Signifikan
PDRB	3.784.722		0.0002	Signifikan
BD	6.749.934		0.0000	Signifikan

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa variabel jumlah penduduk memiliki  $t_{\text{hitung}} = -2.799037 > t_{\text{tabel}} = 1,65810$  diperoleh dari  $\alpha 0,05$ . Selain itu, probabilitas variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini lebih kecil dari  $\alpha 0,05$  ( $0,0060 < 0,05$ ) artinya bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sumatera Utara.

Variabel PDRB memiliki  $t_{\text{hitung}} = 3.784722 > t_{\text{tabel}} = 1,65810$  diperoleh dari  $\alpha 0,05$ . Probabilitas variabel PDRB dalam penelitian ini lebih kecil dari  $\alpha 0,05$  ( $0,0002 < 0,05$ ) yang artinya bahwa variabel PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sumatera Utara.

Variabel belanja daerah memiliki  $t_{\text{hitung}} = 6.749934 > t_{\text{tabel}} = 1,65810$  diperoleh dari  $\alpha 0,05$ . Probabilitas variabel belanja daerah dalam penelitian ini lebih kecil dari  $\alpha 0,05$  ( $0,0000 < 0,05$ ) yang artinya bahwa variabel belanja daerah berpengaruh

dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sumatera Utara.

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Hasil Uji F**

F-Statistik	F-Tabel	Probabilitas	Keterangan
67.03242	3.96	0,000000	Signifikan

Sumber: Hasil penelitian (Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa nilai Fstatistik > Ftabel ( $67.03242 > 3.96$ ) dengan nilai probabilitas sebesar ( $0,000000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah bersama-sama berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Sumatera Utara.

### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan nilai koefisien determinasi dari penelitian ini diperoleh sebesar 0.624721, jadi besarnya pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 0.624721 (62,47%), sedangkan 37,53% lainnya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2012-2021.

Jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah penduduk belum tentu akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah karena jumlah penduduk tidak semua berada pada usia produktif (15-64) tahun yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Sehingga tidak semua berada dalam ruang lingkup sebagai wajib pajak. Dengan kata lain penduduk

memiliki peran tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak kecuali penduduk tersebut berada dalam ruang lingkup sebagai wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Anis(2021) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat.

#### Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2012-2021.

Apabila PDRB meningkat maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang ikut mengalami peningkatan. Sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara PDRB dengan penerimaan pajak daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumy et al(2018) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara.

#### Pengaruh Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan variabel belanja daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2012-2021.

Semakin besar belanja daerah yang diperoleh maka pemerintah semakin lancar dalam menyediakan sarana fasilitas publik yang bertujuan meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Dengan meningkatnya produktifitas para pelaku ekonomi akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Sehingga belanja daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Sesuai dengan teori yang menyatakan apabila peningkatan pajak daerah ini bisa memberikan peran dalam membiayai belanja yang ada pada daerah serta berperan dalam mengatur perekonomian, masyarakat akan dapat bertumbuh

kembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda(2020) yang menyatakan pajak daerah berpengaruh secara positif dan nyata terhadap belanja daerah di Kabupaten Pamekasan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan 12 Kabupaten/Kota.
2. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan 12 Kabupaten/Kota.
3. Secara parsial Belanja daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan 12 Kabupaten/Kota.
4. Secara simultan menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan 12 Kabupaten/Kota.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pemerintah daerah Sumatera Utara khususnya Kabupaten/Kota wilayah Barat agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan pos-pos penerimaan pajak daerah yang meliputi akurasi data subjek dan objek pajak. Sehingga subjek dan objek pajak yang belum terdaftar wajib pajak bisa didaftar ulang sebagai wajib pajak agar penerimaan pajak dapat lebih optimal.
2. Kepada pemerintah perlu meningkatkan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penerimaan pajak daerah. Sehingga dapat menarik investor untuk membangun usaha di provinsi Sumatera

Utara khususnya bagi Kabupaten/Kota wilayah Pantai Barat.

3. Kepada pemerintah harus lebih meningkatkan fasilitas dan layanan publik dengan alokasi belanja daerah yang berguna untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga mempunyai kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi serta perolehan penerimaan pajak lebih maksimal.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan penerimaan pajak daerah maka dapat memperluas objek serta menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini 37,53% masih dipengaruhi oleh faktor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D. R., Murtala, & Rahmah, M (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Binjai. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 03, 28–39.
- Early, S. (2013). *Hukum Pajak*. Selemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadya, R., Begawati, N., & Yusra, I. (2017). Analisis Efektifitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal kerja dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Pundi*, 01(3), 153–166.
- Huda, S. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 3(2), 77–87.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., & Ratulangi. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018)*. 19(2), 1–16.
- Mina, M., & Ratna. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39.

- Nordiawan, D. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, T. P., & Anis, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 71–78.
- Sania, H., Yunita E. A., & Muttaqin, I. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Saputra, A. D., Sudjana, N., & Djudi, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah. *Jurnal Perpajakan* 3(1), 1–8.